

Rapat Reviu Manajemen Layanan Pusdatinrenbang
Kamis, 25 Juli 2024 (Ruang Rapat 3A)

Layanan Pusdatinrenbang akan didasarkan pada nomenklatur Rincian Output (RO) serta tugas dan fungsi (tusi) berdasarkan hukum. Layanan besaran milik Pusdatinrenbang adalah layanan manajemen data dan informasi perencanaan pembangunan nasional. Kemudian dari tusi akan diterjemahkan ke dalam berbagai kegiatan yang didetailkan dalam struktur baru untuk layanan Pusdatinrenbang yang akan disesuaikan kembali agar mudah dipahami. Manajemen layanan SPBE terdiri dari layanan administrasi pemerintahan dan layanan publik yang terkait dengan 3 poin penting antara lain: 1) Pelayanan Pengguna (pintu utama dalam pemberian layanan yang berkoordinasi dengan pengguna layanan terkait permintaan layanan, keluhan, gangguan, masalah, dan perubahan layanan SPBE dan pengguna SPBE); 2) Pengelolaan Aplikasi (terkait pendayagunaan dan pemeliharaan infrastruktur SPBE dan aplikasi SPBE); dan 3) Pengoperasian Layanan (spesifik terkait cara pengoperasian/penggunaan layanan). Penggunaan layanan difasilitasi oleh *tools* yang membantu pelaksanaan kegiatan.

Berdasarkan dasar hukum terkait manajemen layanan SPBE dari KemenPANRB, Tim TakeISIP telah menyusun matriks pemetaan layanan Pusdatinrenbang yang berisikan Nama Kegiatan (dikaitkan dengan proses bisnis), Jenis Kegiatan (layanan, rutin, dan penugasan), Kategori Urusan (utama dan pendukung), Pelaksana Kegiatan, *Tools/Kelengkapan* dan Pengelola *Tools/Kelengkapan*. Jenis Kegiatan dibagi menjadi tiga, 1) Layanan, kegiatan pelayanan yang terdapat permintaan atau pemohon dan tidak terencana, 2) Rutin, kegiatan yang diawali dari penanggungjawab dan terencana, 3) Penugasan, kegiatan yang diawali dengan adanya perintah pimpinan yang berwenang dan terencana. Kategori urusan dibagi menjadi 2 yaitu: utama (terkait fungsi utama/substantif dari pelaksana kegiatan) dan pendukung (terkait fungsi pendukung di luar fungsi substantif kegiatan). Matriks pemetaan layanan Pusdatinrenbang disusun berdasarkan Metadata Layanan Pusdatinrenbang Tahun 2024 dari Tim KMLP sehingga perlu adanya konfirmasi dari masing-masing tim pelaksana layanan. Saran untuk matriks pemetaan layanan Pusdatinrenbang akan ditambahkan kolom deskripsi kegiatan agar lebih detail. Setiap layanan akan ada dua kolom tambahan yaitu Kegiatan Pelayanan Pengguna (Tim KMLP) dan Kegiatan Manajemen Risiko (Tim TakeISIP) dikarenakan semua layanan butuh pelayanan pengguna atau *helpdesk* dan manajemen risiko secara rutin di tiap tim. Matriks ini bersifat *living document*. Matriks kegiatan yang dipetakan oleh Tim TakeISIP bukan katalog layanan, akan ada matriks lain terkait katalog layanan yang disediakan oleh Tim KMLP dan Tim Aplikasi yang terdiri dari isian nama layanan, deskripsi layanan, sekilas informasi, kegunaan layanan, akses layanan dan pelaksana (utama dan pendukung). Matriks yang telah disusun oleh Tim TakeISIP bersifat holistik sedangkan matriks katalog layanan bersifat siap digunakan untuk UKE.

Berikut saran dan kesimpulan dari Rapat Reviu Manajemen Layanan Pusdatinrenbang, antara lain:

1. Perlu dilakukan identifikasi aktor. Penulisan pelaksanaan kegiatan seakan akan sebagai PJ utama karena beberapa layanan yang dibangun Tim Aplikasi bersinggungan dengan tim lain.
2. Matriks pemetaan layanan Pusdatinrenbang akan didiskusikan kembali dengan Tim KMLP terkait pengisian kolom nama kegiatan.
3. Rencananya bulan depan akan ada *expo* layanan, bagaimana jika matriksnya disusun lebih detail karena *expo* layanan nanti setiap tim layanan akan menjabarkan terkait layanannya masing-masing.
4. Hasil identifikasi Matriks pemetaan layanan Pusdatinrenbang sebaiknya diinfokan kepada seluruh tim akan dikelola seperti apa sehingga diketahui dengan jelas pelaksana kegiatan serta batasan pelaksanaan kegiatannya.
5. Matriks pemetaan layanan Pusdatinrenbang melihat dari perspektif kegiatan lebih mendetail yang meliputi seluruh kegiatan baik yang bersifat layanan, rutin, maupun penugasan dan bertujuan untuk mengulik lebih jauh arsitektur SPBE yang di dalamnya terdapat domain data dan informasi, layanan, manajemen, dan lainnya sehingga didapatkan *Cross Functional Map* (CFM) antar tim di Pusdatinrenbang.
6. Matriks pemetaan layanan Pusdatinrenbang disesuaikan dengan SOP untuk bahan diskusi lebih lanjut.
7. Tiap tim wajib menyampaikan 1-2 layanan (minimal 1 layanan) yang dimiliki.